



DOKUMEN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

TAHUN
ANGGARAN 2026

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya Laporan Kinerja Triwulan I Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Triwulan I Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur ini disusun berdasarkan penjabaran target kinerja secara periodik pada tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Rencana Aksi TA 2026. Laporan ini disusun dengan melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran atas capaian terhadap sasaran dan target kinerja untuk kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Triwulanan. Selain itu, Laporan ini berisi realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan kemudian dibandingkan dengan target tiap triwulannya.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 35/KPTS/M/2025 yang disahkan pada bulan Maret 2025. Dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur membantu Balai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dalam melaksanakan Pembangunan Perumahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengacu pada tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV seperti tercantum pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pelaksanaan paket pekerjaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur akan dilakukan pemantauan secara berkala tiap triwulan dengan dokumen rencana aksi sebagai dasarnya. Laporan Kinerja Triwulan I Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur ini merupakan alat pemantauan dan evaluasi pencapaian target dalam bentuk laporan pengukuran kinerja. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulanan ini diharapkan permasalahan dan kendala yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target dapat diantisipasi pada bulan berikutnya.

Surabaya, Juli 2026
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Timur

Shinta Dewi Astari S.T., M.T.
NIP. 198212072006042021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. TUGAS DAN FUNGSI	6
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	7
BAB II.....	9
CAPAIAN KINERJA	9
2.1. TARGET KINERJA TRIWULAN II	9
A. TARGET KINERJA FISIK TRIWULAN II BERDASARKAN TARGET PK AWAL	9
B. TARGET KINERJA KEUANGAN TRIWULAN II BERDASARKAN TARGET PK AWAL.....	11
2.2. CAPAIAN TARGET TRIWULAN II	16
A. CAPAIAN TARGET FISIK TRIWULAN II.....	16
B. CAPAIAN TARGET KEUANGAN TRIWULAN II	18
C. PERUBAHAN TARGET DAN REVISI DIPA PADA TRIWULAN II	19
2.3. PERMASALAHAN ATAU FAKTOR KEBERHASILAN	26
BAB III.....	28
PENUTUP	28
3.1. RENCANA TINDAK LANJUT	28
LAMPIRAN	29

DAFTAR TABEL

TABEL 1. TARGET KINERJA TRIWULAN I TA. 2026	9
TABEL 2. TARGET KEUANGAN TRIWULAN II TA. 2026	11
TABEL 3. PERUBAHAN TARGET CAPAIAN BERDASARKAN PK REVISI I	12
TABEL 3. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TA. 2026.....	16
TABEL 5. CAPAIAN KEUANGAN TRIWULAN II TA 2026	18
TABEL 6. DAFTAR REVISI DIPA DAN PERUBAHAN OUTPUT	19
TABEL 6. DAFTAR PERUBAHAN TARGET KEUANGAN	25
TABEL 7. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT TRIWULAN II	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap instansi dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran melalui capaian kinerja yang terukur. Pengukuran kinerja merupakan salah satu penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Triwulanan pada hakekatnya memuat ringkasan pencapaian kinerja dalam kurun waktu 3 bulan. Laporan kinerja triwulanan disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Rencana Aksi. Penyusunan laporan triwulan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja Triwulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur disusun guna mendukung Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dan merupakan penjabaran pencapaian target secara periodik atas sasaran dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Rencana Aksi yang menjadi acuan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berkala (triwulan) dalam 1 (satu) tahun masa anggaran.

Target kinerja dan capaian target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Laporan Kinerja Triwulanan ini merupakan penjabaran dari target kinerja beberapa Unit Organisasi antara lain Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Laporan Kinerja Triwulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur ini merupakan alat pemantauan dan evaluasi pencapaian target dalam bentuk laporan pengukuran kinerja. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulanan ini diharapkan permasalahan dan kendala yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target dapat diantisipasi pada bulan berikutnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan yang diturunkan dari tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pertama yaitu “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif di Provinsi Jawa Timur”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - b. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - e. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - f. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
2. Tujuan kedua yaitu “Peningkatan kualitas tata kelola Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur” dengan indikator kemajuan dalam kualitas layanan manajemen organisasi, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan tercapainya indikator ini, diharapkan kinerja balai semakin kredibel dan pelaksanaan tugas serta fungsi dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur menjabarkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, melalui serangkaian program dan kegiatan. Mengacu pada sasaran strategis Unit Organisasi dan Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV, Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Hunian Layak, yaitu melalui kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni;
2. Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh, melalui kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh; dan
3. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur.

Sasaran Program (SP) tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yang ditargetkan selama periode 2025-2029, sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 Meningkatnya Hunian Layak, yaitu melalui kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni dengan Sasaran Kegiatan:
 - Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Jawa IV;
 - Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
2. Sasaran Program 2 Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh, melalui kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh dengan Sasaran Kegiatan:
 - Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
3. Sasaran Program 3 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dengan Sasaran Kegiatan:
 - Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satker PKP Provinsi Jawa Timur

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai dampak dari lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Selanjutnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 35/KPTS/M/2025 yang disahkan pada bulan Maret 2025. Dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur membantu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dalam melaksanakan Pembangunan Perumahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengacu pada tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV seperti tercantum pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

TUGAS

Mengacu pada tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Unit Pelaksana Tugas (UPT) yaitu melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas diatas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

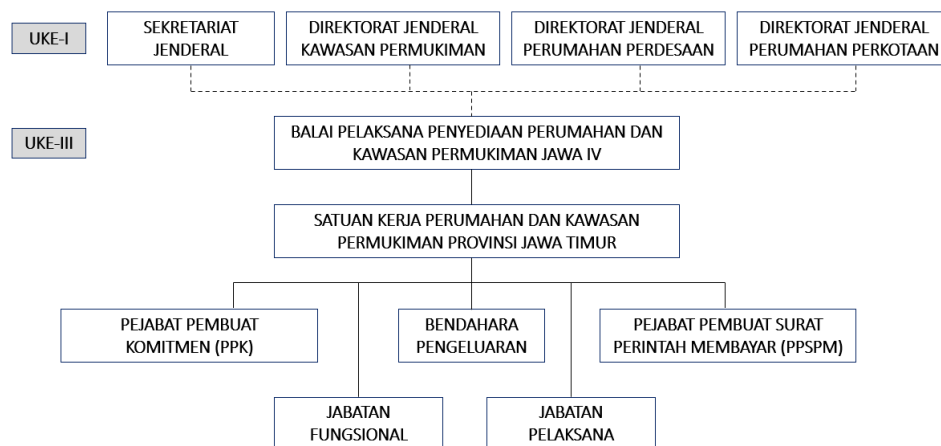
Dari beberapa penyelenggaraan fungsi diatas, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur berfokus melaksanakan fungsi nomor c,d, dan e.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam membantu tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV khususnya dalam hal pelaksanaan Pembangunan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman serta penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial di Provinsi Jawa Timur, maka dibentuklah Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dan mengampu kegiatan dari 4 (empat) Unit

Kerja Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat tenaga penunjang utama dalam susunan organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Kepala Satuan Kerja, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu juga terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seluruh jajaran dalam susunan organisasi pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memainkan peran penting dalam pelaksanaan tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan guna memastikan penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman di Provinsi Jawa Timur dapat berjalan secara efisien, efektif, dan optimal.



Gambar 1. Struktur Organisasi Satker PKP Provinsi Jawa Timur

BAB II

CAPAIAN KINERJA

2.1. TARGET KINERJA TRIWULAN II

A. TARGET KINERJA FISIK TRIWULAN II BERDASARKAN TARGET PK AWAL

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penetapan kinerja adalah komitmen formal antara pimpinan dan pelaksana untuk mencapai target tertentu dalam satu tahun anggaran, dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Penetapan Kinerja dalam adalah proses menetapkan target kinerja yang spesifik, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi, kemudian menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah operasional yang lebih detail agar dapat dilaksanakan oleh unit kerja.

Target Kinerja Triwulan II ini mengacu pada target pada Perjanjian Kinerja (PK) Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam Dokumen Rencana Aksi.

Target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur merupakan penjabaran dari target kinerja beberapa Unit Organisasi antara lain Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 1. Target Kinerja Triwulan I TA. 2026

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN TRIWULAN II
UO	SEKRETARIAT JENDERAL		
P	DUKUNGAN MANAJEMEN		
SK	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal		
1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan	5,57%
2	Jumlah layanan perkantoran	1 layanan	49,59%
3	Jumlah layanan sarana internal	1 unit	77,13%
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukima		
1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan	32,48%

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN TRIWULAN II
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SK	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Perdesaan		
1	Jumlah unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	320 Unit	160 unit
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan		
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 laporan	50%
P	DUKUNGAN MANAJEMEN		
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan	50%
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan	65,05%
P	DUKUNGAN MANAJEMEN		
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		
1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	11,51%

B. TARGET KINERJA KEUANGAN TRIWULAN II BERDASARKAN TARGET PK AWAL

Selain itu terdapat pula Target Keuangan Triwulan yang merupakan penggabungan target keuangan 3 bulan yang diambil dari Halaman 3 DIPA Revisi 1 yang menjadi dasar penyusunan PK Awal masing-masing Unit Organisasi. Target Keuangan Triwulan II mencakup target keuangan dari Bulan April, Mei, dan Juni Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2. Target Keuangan Triwulan II TA. 2026

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET KEU (PK AWAL)	TARGET KEU (TRIWULAN I)
UO	SEKRETARIAT JENDERAL		
P	DUKUNGAN MANAJEMEN		
NOMOR	DIPA- 146.01.1.691403/2026		
1	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp 830.402.000	Rp 437.137.000
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.03.1.691457/2026		
1	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp 46.354.000	Rp 15.053.500
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.04.1.691511/2026		
1	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp 11.288.865.000	Rp 5.644.431.000
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.05.1.691565/2026		
1	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp 30.173.000	Rp 13.493.000

C. PERUBAHAN TARGET KINERJA TRIWULAN II BERDASARKAN PK REVISI I

Selama periode bulan April hingga Juni Tahun 2026 terdapat beberapa revisi DIPA yang terjadi yang menyebabkan adanya perubahan target output pada dokumen Rencana Aksi yang mengacu pada PK Awal. Adapun perubahan target output pada Revisi DIPA terakhir di Triwulan II telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Revisi I. Rincian perubahan target output berdasarkan PK Revisi I dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3. Perubahan Target Capaian Berdasarkan PK Revisi I

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET PK AWAL	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
UO	SEKRETARIAT JENDERAL							
P	DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen							SK BERDASARKAN PK AWAL
1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan	Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaporan	5,57%	5,57%	98,95%	100,00%	TARGET TETAP MENGACU PADA RENAKSI (PK AWAL)
2	Jumlah layanan perkantoran	1 layanan	Pelaksanaan operasional kantor	24,59%	49,59%	74,59%	100,00%	TARGET TETAP MENGACU PADA RENAKSI (PK AWAL)
3	Jumlah layanan sarana internal	1 unit	Penyediaan sarana operasional kantor	0,00%	77,13%	100,00%	100,00%	TARGET TETAP MENGACU PADA RENAKSI (PK AWAL)
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN							
P	DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukima							SK BERDASARKAN PK AWAL
1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan	Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaporan	8,97%	32,48%	55,48%	100,00%	TARGET TETAP MENGACU PADA RENAKSI (PK AWAL)
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman							SASARAN KEGIATAN BARU BERDASARKAN PK REVISI I
1	Jumlah rumah susun yang terbangun	1 unit	Pelaksanaan Pembangunan rumah susun yang meliputi kegiatan perencanaan, Pembangunan, dan pengawasan	0	0	0	1 unit	INDIKATOR KINERJA BARU BERDASARKAN PK REVISI I

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET PK AWAL	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	6.588 unit	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pemberian stimulant bantuan	0	2.196 unit	4.392 unit	6.588 unit	INDIKATOR KINERJA BARU BERDASARKAN PK REVISI I
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN							
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SK	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Perdesaan							SK DIHAPUS PADA PK REVISI I
1	Jumlah unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan							INDIKATOR KINERJA DIHAPUS PADA PK REVISI I
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan							SK BERDASARKAN PK AWAL
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 laporan	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi	25%	50%	75%	100%	TARGET TETAP MENGACU PADA RENAKSI (PK AWAL)
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di wilayah perdesaan							SASARAN KEGIATAN BARU BERDASARKAN PK REVISI I
1	Jumlah Unit Rumah yang Mendapatkan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Perdesaan	260 unit	Pelaksanaan pembangunan PSU untuk rumah subsidi yang meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, dan penagwasan	0	0	130 unit	260 unit	INDIKATOR KINERJA BARU BERDASARKAN PK REVISI I

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET PK AWAL	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
SK	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan							SASARAN KEGIATAN BARU BERDASARKAN PK REVISI I
1	Jumlah Rumah bersanitasi layak di Wilayah Perdesaan	200 unit	Peningkatan kualitas sanitasi rumah di Provinsi Jawa Timur	0	0	100 unit	100 unit	INDIKATOR KINERJA BARU BERDASARKAN PK REVISI I
2	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	13.686 unit	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pemberian stimulant bantuan	0	4.562 unit	9.124 unit	13.686 unit	INDIKATOR KINERJA BARU BERDASARKAN PK REVISI I
SK	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu							SASARAN KEGIATAN BARU BERDASARKAN PK REVISI I
1	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perdesaan	15 Ha	Penanganan permukiman kumuh	0	0	0	15 Ha	INDIKATOR KINERJA BARU BERDASARKAN PK REVISI I
P	DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan							SK BERDASARKAN PK AWAL
1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan	Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaporan	25%	50%	75%	100%	TARGET TETAP MENGACU PADA RENAKSI (PK AWAL)

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET PK AWAL	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN							
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							SK BERDASARKAN PK AWAL
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi	6,06%	65,05%	98,00%	100%	TARGET TETAP MENGACU PADA RENAKSI (PK AWAL)
SK	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan							SASARAN KEGIATAN BARU BERDASARKAN PK REVISI I
1	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	3.800 unit	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pemberian stimulant bantuan	0	1.266 unit	2.533 unit	3.800 unit	INDIKATOR KINERJA BARU BERDASARKAN PK REVISI I
P	DUKUNGAN MANAJEMEN							
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							SK BERDASARKAN PK AWAL
1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaporan	2,41%	11,51%	69,97%	100%	TARGET TETAP MENGACU PADA RENAKSI (PK AWAL)

2.2. CAPAIAN TARGET TRIWULAN II

A. CAPAIAN TARGET FISIK TRIWULAN II

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memiliki target sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 dan Dokumen Rencana Aksi TA 2026 dengan target capaian kinerja tiap triwulan. Evaluasi capaian kinerja kegiatan dilakukan untuk mengetahui besaran capaian yang berhasil direalisasikan. Besaran capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah yang dapat direalisasikan dibagi dengan jumlah yang direncanakan baik fisik maupun keuangan.

Tabel 4. Capaian Kinerja Triwulan II TA. 2026

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET CAPAIAN TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	PROSENTASE CAPAIAN TRIWULAN II	KETERANGAN
UO	SEKRETARIAT JENDERAL				
P	DUKUNGAN MANAJEMEN				
SK	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal				
1	Jumlah Layanan Umum	5,57%	76,22%	1368,40%	-
2	Jumlah layanan perkantoran	49,59%	54,25%	109,40%	-
3	Jumlah layanan sarana internal	77,13%	95,11%	123,31%	-
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukima				
1	Jumlah Layanan Umum	32,48%	0,00%	0,00%	-
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan permukiman				
1	Jumlah rumah susun yang terbangun	0 unit	0 unit	0,00%	-
2	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	2.196 unit	5 unit	0,23%	-

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET CAPAIAN TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	PROSENTASE CAPAIAN TRIWULAN II	KETERANGAN
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	50%	38,16%	76,32%	-
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di wilayah perdesaan				
1	Jumlah Unit Rumah yang Mendapatkan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Perdesaan	0 unit	0 unit	0,00%	Progres fisik baru akan berjalan di TW III
SK	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan				
1	Jumlah Rumah bersanitasi layak di Wilayah Perdesaan	0 unit	0 unit	0,00%	Progres fisik baru akan berjalan di TW III
2	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	4.562 unit	7 unit	0,15%	-
SK	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu				
1	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perdesaan	0 Ha	0 Ha	0,00%	Progres fisik baru akan berjalan di TW III
P	DUKUNGAN MANAJEMEN				
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
1	Jumlah Layanan Umum	50%	0,00%	0,00%	-
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN				
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	65,05%	43,35%	66,64%	-

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET CAPAIAN TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	PROSENTASE CAPAIAN TRIWULAN II	KETERANGAN
SK	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan				
1	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	1.266 unit	36 unit	2,84%	-
P	DUKUNGAN MANAJEMEN				
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
1	Jumlah Layanan Umum	11,51%	0,00%	0,00%	-

B. CAPAIAN TARGET KEUANGAN TRIWULAN II

Capaian keuangan tiap triwulan berdasarkan data realisasi pada Dokumen FA Detail masing-masing DIPA dan berdasarkan pada aplikasi myPKP (<https://my.pkp.go.id/>).

Tabel 5. Capaian Keuangan Triwulan II TA 2026

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET KEU (TRIWULAN II)	CAPAIAN KEU (TRIWULAN II)	PROSENTASE CAPAIAN KEUANGAN
UO	SEKRETARIAT JENDERAL			
P	DUKUNGAN MANAJEMEN			
NOMOR	DIPA- 146.01.1.691403/2026			
1	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp 437.137.000	Rp 498.451.357	114,03%
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN			
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NOMOR	DIPA- 146.03.1.691457/2026			
1	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp 15.053.500	Rp 22.147.360.701	147124,33%
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NOMOR	DIPA- 146.04.1.691511/2026			
1	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp 5.644.431.000	Rp 112.392.205.674	1991,21%
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN			
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NOMOR	DIPA- 146.05.1.691565/2026			
1	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp 13.493.000	Rp 11.530.698.980	85456,90%

C. PERUBAHAN TARGET DAN REVISI DIPA PADA TRIWULAN II

Selama periode April hingga Juni Tahun 2026 terdapat beberapa revisi DIPA yang menyebabkan terjadi perubahan anggaran dan target output. Rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 6. Daftar Revisi DIPA dan Perubahan Output

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL			
1	DIPA Revisi 3 14 April 2026	Rp 830.402.000,00	Perihal : Pemutakhiran Hal III DIPA List Rincian Output: - 7665.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp11.853.000 - 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp707.615.000 - 7665.EBB.951 Layanan Sarana Internal : 1 Unit, Rp.110.934.000 <i>*output tetap, pagu tetap</i>
2	DIPA Revisi 4 07 Mei 2026	Rp 830.402.000,00	Perihal Revisi : Pemutakhiran Halaman III DIPA List Rincian Output: - 7665.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp11.853.000 - 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp707.615.000 - 7665.EBB.951 Layanan Sarana Internal : 1 Unit, Rp.110.934.000 <i>*output tetap, pagu tetap</i>
3	DIPA Revisi 5 3 Juni 2026	Rp 830.402.000,00	Perihal Revisi : Perubahan Rincian Anggaran (Lintas Komponen) List Rincian Output: - 7665.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp11.853.000 - 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp707.615.000 - 7665.EBB.951 Layanan Sarana Internal : 1 Unit, Rp.110.934.000 <i>*output tetap, pagu tetap</i>
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN			
1	DIPA Revisi 4 24 April 2026	Rp 56.764.218.000	Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Rincian Output: - 7659.RBB.008 Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 2400 Unit, Rp. 56.719.105.000 - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 45.113.000 <i>(output tetap, pagu berubah)</i>

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
2	DIPA Revisi 5 Tanggal 28 April 2026	Rp69.694.344.000	Revisi DJA (Penambahan Anggaran dan Penambahan KRO) Rincian Output: - 7659.RBB.004 Pembangunan Rumah Susun : 1 unit ; Rp 12.930.126.000 - 7659.RBB.008 Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 2400 Unit, Rp. 56.719.105.000 - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 45.113.000 (output berubah, pagu berubah)
3	DIPA Revisi 6 Tanggal 11 Mei 2026	Rp69.694.344.000	Revisi POK (Pergeseran Alokasi Anggaran dan Perubahan Item) Rincian Output: - 7659.RBB.004 Pembangunan Rumah Susun : 1 unit ; Rp 12.930.126.000 - 7659.RBB.008 Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 2400 Unit, Rp. 56.719.105.000 - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 45.113.000 (output tetap, pagu tetap)
4	DIPA Revisi 7 Tanggal 26 Mei 2026	Rp155.996.115.000	Revisi DJA (Penambahan Anggaran) Rincian Output: - 7659.RBB.004 Pembangunan Rumah Susun : 1 unit ; Rp 12.930.126.000 - 7659.RBB.008 Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 6588 Unit, Rp. 143.020.876.000 - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 45.113.000 (output berubah, pagu berubah)

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
5	DIPA Revisi 8 Tanggal 29 Juni 2026	Rp155.996.115.000	Revisi POK (Pemecahan Rincian Fisik dan Wasdal BSPS menjadi 2 PPK) Rincian Output: - 7659.RBB.004 Pembangunan Rumah Susun : 1 unit ; Rp 12.930.126.000 - 7659.RBB.008 Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 6588 Unit, Rp. 143.020.876.000 - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 45.113.000 (output tetap, pagu tetap)
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
1	DIPA Revisi 4 Tanggal 8 April 2026	Rp152.354.082.000	Perihal : Revisi DJA (Penambahan Anggaran dan Perubahan KRO) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 100.004.000,00 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.106.143.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 6300 Unit, Rp. 137.651.622.000,00 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.184.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output berubah, pagu berubah)
2	DIPA Revisi 5 Tanggal 23 April 2026	Rp151.062.686.000	Perihal : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			Swadaya di Perdesaan : 6300 Unit, Rp. 136.527.149.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output tetap, pagu berubah)
3	DIPA Revisi 6 Tanggal 08 Mei 2026	Rp151.062.686.000	Perihal : Revisi POK (Pergeseran Alokasi Anggaran dan Perubahan Item) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 6300 Unit, Rp. 136.527.149.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output tetap, pagu tetap)
4	DIPA Revisi 7 Tanggal 18 Mei 2026	Rp151.062.686.000	Perihal : Revisi POK (Perubahan Item) dan Pemutakhiran Rencana Penyerapan Dana (Halaman III DIPA) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 6300 Unit, Rp. 136.527.149.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output tetap, pagu tetap)

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
5	DIPA Revisi 8 Tanggal 19 Mei 2026	Rp151.062.686.000	Perihal : Revisi POK (Perubahan Item) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 6300 Unit, Rp. 136.527.149.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output tetap, pagu tetap)
6	DIPA Revisi 9 Tanggal 9 Juni 2026	Rp305.216.692.000	Perihal : Revisi DJA (Penambahan Anggaran) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 13.686 Unit, Rp. 290.681.155.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output berubah, pagu berubah)
7	DIPA Revisi 10 Tanggal 24 Juni 2026	Rp305.216.692.000	Perihal : Pemutakhiran Revisi POK (Pemecahan Rincian Item Fisik dan Wasdal BPS menjadi 4 PPK) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 13.686 Unit, Rp. 290.681.155.000

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			- 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output tetap, pagu tetap)
8	DIPA Revisi 11 Tanggal 30 Juni 2026	Rp305.216.692.000	Perihal : Revisi DJA (Buka Blokir) Rincian Output (RO) : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan : 1 Laporan, Rp. 90.661.000 - 7660.RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan : 260 unit ; Rp 3.293.461.000 - 7660.RBB.006 Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan : 200 unit ; Rp 2.053.563.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 13.686 Unit, Rp. 290.681.155.000 - 7660.RBB.011 Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan : 15 Hektar ; Rp 9.079.600.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000,00 (output tetap, pagu tetap)
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN			
1	DIPA Revisi 4 Tanggal 23 April 2026	Rp58.421.316.000	Perihal : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) Rincian Output: - 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp. 18.133.000 - 7661.RBB.006 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di perkotaan : 2700 Unit, Rp. 58.390.726.000 - 7676.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 12.457.000,00 (output tetap, pagu berubah)
2	DIPA Revisi 5 Tanggal 16 Mei 2026	Rp58.421.316.000	Perihal : Pemutakhiran Rencana Penyerapan Dana (Halaman III DIPA) Rincian Output: - 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp. 18.133.000 - 7661.RBB.006 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di perkotaan : 2700 Unit, Rp. 58.390.726.000

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			- 7676.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 12.457.000,00 (output tetap, pagu tetap)
3	DIPA Revisi 6 Tanggal 17 Juni 2026	Rp82.248.786.000	Perihal : Revisi DJA (Penambahan Anggaran) Rincian Output: - 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp. 18.133.000 - 7661.RBB.006 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di perkotaan : 3.800 Unit, Rp. 82.218.196.000 - 7676.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 12.457.000,00 (output berubah, pagu berubah)
4	DIPA Revisi 7 Tanggal 29 Juni 2026	Rp82.248.786.000	Perihal : Revisi DJA (Buka Blokir) Rincian Output: - 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp. 18.133.000 - 7661.RBB.006 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di perkotaan : 3.800 Unit, Rp. 82.218.196.000 - 7676.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 12.457.000,00 (output tetap, pagu tetap)

Tabel 7. Daftar Perubahan Target Keuangan

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET KEU (PK AWAL)	TARGET KEU BERDASARKAN REVISI DIPA PADA AKHIR TW II
UO	SEKRETARIAT JENDERAL		
P	DUKUNGAN MANAJEMEN		
NOMOR	DIPA- 146.01.1.691403/2026		
1	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp 830.402.000	Rp 830.402.000
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.03.1.691457/2026		
1	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp 46.354.000	Rp155.996.115.000

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET KEU (PK AWAL)	TARGET KEU BERDASARKAN REVISI DIPA PADA AKHIR TW II
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.04.1.691511/2026		
1	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp 11.288.865.000	Rp305.216.692.000.00
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.05.1.691565/2026		
1	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp 30.173.000	Rp82.248.786.000.00

2.3. PERMASALAHAN ATAU FAKTOR KEBERHASILAN

Beberapa permasalahan dalam pencapaian target kinerja dan keuangan pada Triwulan II dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan II

KEGIATAN	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Dukungan Manajemen (Non-Bantuan)	Masih terdapat realisasi 0,00 % pada Kegiatan Dukman di DIPA Dirjen Kawasan Permukiman, DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan, dan DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan	Akan dilakukan percepatan penyerapan di TW III dan IV
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan masih mengalami keterlambatan akibat belum tersedianya CPB/BNBA pengganti,	Mempercepat proses verifikasi dan validasi data CPB/BNBA bersama pemerintah desa dan instansi pengusul.
	Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), masih belum mencukupi.	Memenuhi kebutuhan TFL serta mempercepat penerbitan SK dan penempatan personel pada wilayah yang masih kekurangan.
	Pelaksanaan di lapangan menghadapi hambatan berupa lokasi penerima yang berjauhan, keterlambatan distribusi material akibat terbatasnya pasokan,	Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap progres pelaksanaan serta percepatan distribusi material agar target pelaksanaan BSPS dapat tercapai sesuai jadwal.

KEGIATAN	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	keterbatasan tenaga kerja, serta menurunnya kemampuan swadaya masyarakat pada tahap akhir pembangunan	
Bantuan PSU Rumah Tapak	Belum terdapat realisasi fisik pada TW II	Pelaksanaan fisik baru akan berjalan pada TW III
Peningkatan Kualitas Sanitasi	Belum terdapat realisasi fisik pada TW II	Pelaksanaan fisik baru akan berjalan pada TW III, saat ini masih proses penyusunan DED
Peningkatan Permukiman Kumuh	Belum terdapat realisasi fisik pada TW II	Pelaksanaan fisik baru akan berjalan pada TW III, saat ini masih proses pelaksanaan Seleksi (untuk paket Supervisi) dan Tender (untuk paket fisik)
Pembangunan Rumah Susun	Lahan usulan Pembangunan rumah susun tidak siap bangun (membutuhkan pematangan lahan)	Berkoordinasi dengan pihak Penerima Manfaat untuk melakukan pematangan lahan dan melengkapi dokumen kesiapan pelaksanaan konstruksi
	Beberapa dokumen kesiapan pelaksanaan konstruksi belum lengkap (Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa dan surat konfirmasi lapangan terhadap risiko bencana & peraturan bangunan gedung)	

BAB III

PENUTUP

3.1. RENCANA TINDAK LANJUT

Pada Triwulan II Tahun 2026, rata-rata kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur masih belum memenuhi target capaian yang ditentukan. Selanjutnya akan dilakukan percepatan capaian kinerja dan penyerapan anggaran pada Triwulan III Tahun Anggaran 2026 antara lain:

- a. Melakukan pemantauan berkala kegiatan di Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Timur agar sesuai dengan rencana pelaksanaan dan tidak mengalami keterlambatan;
- b. Melakukan pemantauan secara intens terhadap progress kegiatan yang sedang berjalan;
- c. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan PSU, Peningkatan Kualitas Sanitasi, dan Peningkatan Permukiman Kumuh;
- d. Melakukan percepatan pelaksanaan BSPS mengingat capaian pelaksanaan progress fisik masih sangat jauh dibawah target yang ditentukan;
- e. Melakukan percepatan penyerapan anggaran pada kegiatan Dukungan Manajemen.

LAMPIRAN

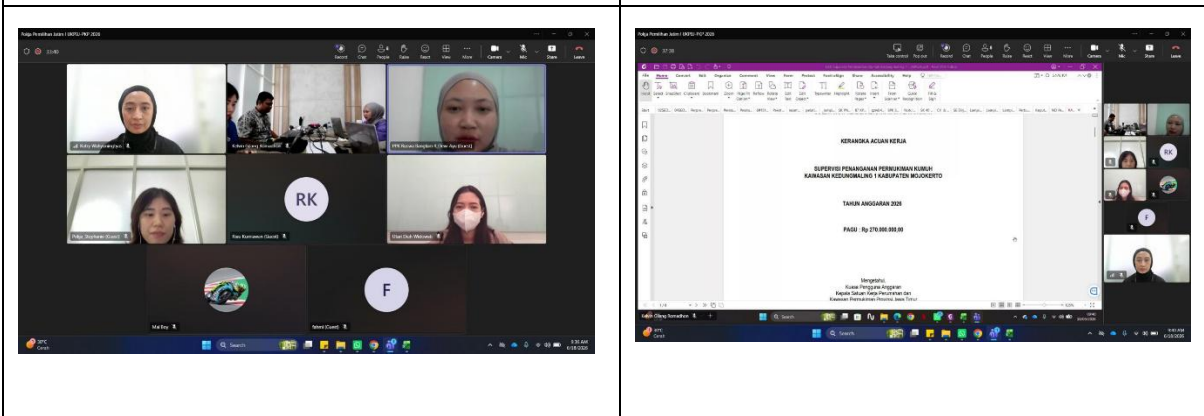
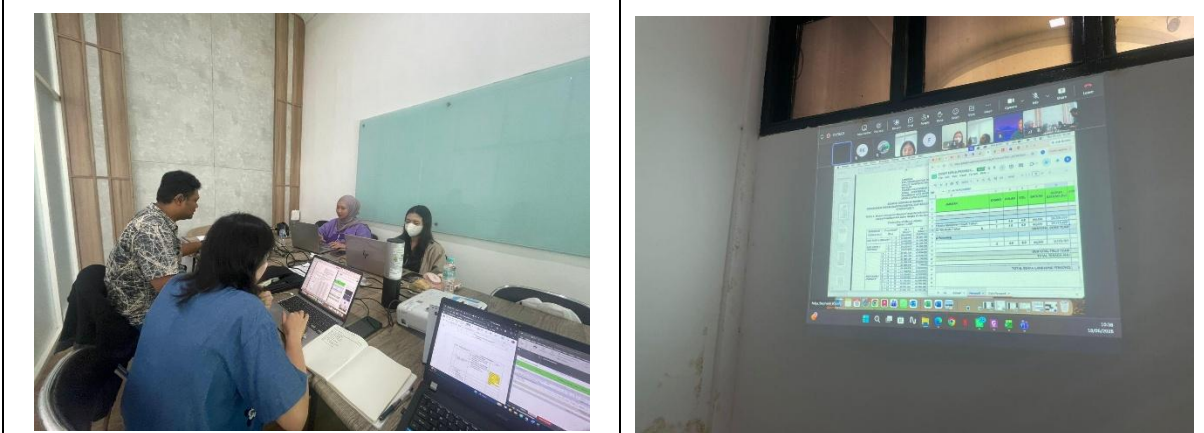
DOKUMENTASI KEGIATAN TRIWULAN II (APRIL – JUNI 2026)

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur pada Triwulan II TA 2026





Dokumentasi Kegiatan Rapat Progres Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026



Dokumentasi Kegiatan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan (Sop4) Paket Supervisi Dan Fisik Penanganan Permukiman Kumuh Kedungmaling 1 Mojokerto



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi dengan OPD Kab. Bangkalan terkait Pelaksanaan Kegiatan BSPS TA 2026



Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan Lapangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Rumah Susun Pondok Pesantren Miftahul Ulum



Dokumentasi Kunjungan Lapangan Kegiatan BSPS di Kab. Lumajang



Dokumentasi Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program BSPS TA. 2026 di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang



Dokumentasi Kegiatan Peninjauan Progres BSPS di Kab. Pacitan



Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Penanganan Permukiman Kumuh di Mojokerto



Dokumentasi Kegiatan Peninjauan Progres BSPS di Kab. Pacitan



Dokumentasi Kegiatan Peninjauan Rumah Subsidi di Kab. Bangkalan sebagai Persiapan Kunjungan Menteri PKP

LAMPIRAN

**DOKUMEN PERJANJIAN
KINERJA (PK) REVISI I**



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Enfy Diana Dewi**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 30 Juni 2026

Pihak Kedua



Enfy Diana Dewi
NIP. 197605132005022001

Pihak Pertama



Shinta Dewi Astari
NIP. 198212072006042021

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah rumah susun yang terbangun	1 unit
		2	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	6.588 unit
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukima	1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

PAGU APBN

Rp

155.996.115.000,00

Surabaya, 30 Juni 2026

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV**



ENFY DIANA DEWI
NIP. 197605132005022001

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR**



SHINTA DEWI ASTARI
NIP. 198212072006042021



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Enfy Diana Dewi**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 30 Juni 2026

Pihak Kedua



Enfy Diana Dewi

NIP. 197605132005022001

Pihak Pertama



Shinta Dewi Astari

NIP. 198212072006042021

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di wilayah perdesaan	1 Jumlah Unit Rumah yang Mendapatkan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Perdesaan	260 unit
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Rumah bersanitasi layak di Wilayah Perdesaan	200 unit
		2 Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	13.686 unit
4	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perdesaan	15 Ha
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Layanan Umum	1 layanan

KEGIATAN

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

PAGU APBN

Rp

305.216.692.000,00

Surabaya, 30 Juni 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV


ENFY DIANA DEWI
 NIP. 197605132005022001

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR


SHINTA DEWI ASTARI
 NIP. 198212072006042021



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Shinta Dewi Astari**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Enfy Diana Dewi**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 30 Juni 2026

Pihak Kedua



Enfy Diana Dewi

NIP. 197605132005022001

Pihak Pertama



Shinta Dewi Astari

NIP. 198212072006042021

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	3.800 unit
Program Dukungan Manajemen				
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

PAGU APBN

Rp 82.248.786.000,00

Surabaya, 30 Juni 2026

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN JAWA IV**


ENFY DIANA DEWI
NIP. 197605132005022001

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR**


SHINTA DEWI ASTARI
NIP. 198212072006042021



SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR